

DOKUMEN RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PENGADILAN AGAMA FAKFAK TAHUN 2019

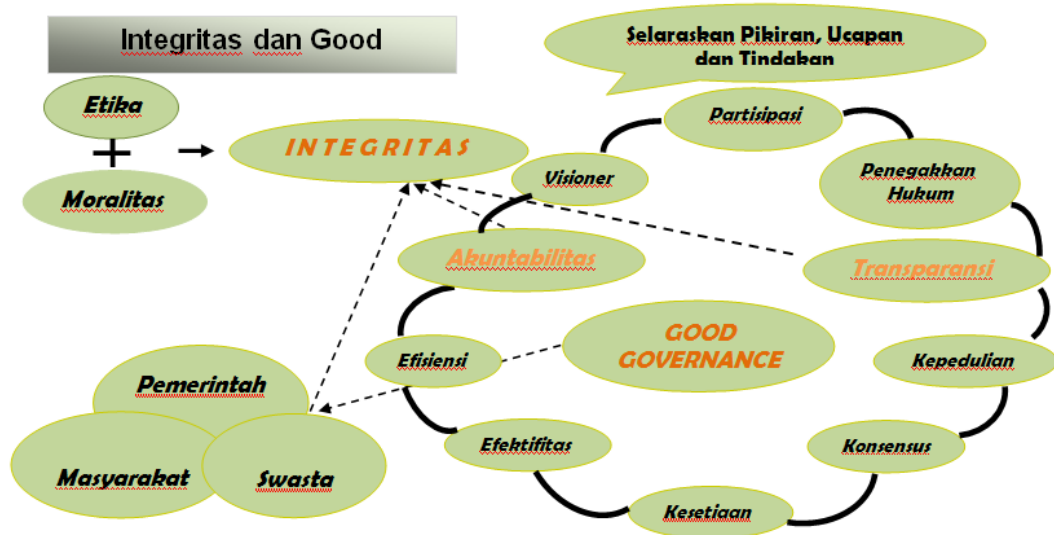


oleh:

TIM KERJA

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
PENGADILAN AGAMA FAKFAK
2019**

**DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN AGAMA FAKFAK
2019**



Mengetahui,
Wakil Ketua Pengadilan Agama Fakfak

Drs. AMAR HUJANTORO, M.H
NIP.196803031997031001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara kongkrit dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya ***pembangunan Zona Integritas***. Dalam rangka pembangun Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan zona integritas pada Pengadilan agama fakfak dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pengadilan Agama Fakfak dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilingkungan Pengadilan Agama Fakfak.

1.4. Pengertian Umum.

Dalam dokumen rencana kerja ini, yang dimaksud dengan Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;

Unit Kerja adalah Unit / satuan Kerja di instansi Pemerintah, serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.

Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

BAB II

PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2.1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi / pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pacta Integritas. Penandatanganan dokumen Pacta Integritas dapat dilakukan secara masal / serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal dan vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pacta Integritas, dapat melanjutkan / melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas;

Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

2.2 Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Program pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

BAB III

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA FAKFAK

I. KOMPONEN PENGUNGKIT :

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
I	MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Tim Kerja	SK Tim Kerja ZI telah dibuat sesuai prosedur yang telah ditetapkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SOP pemilihan tim kerja ZI 2. Pemilihan calon anggota Tim Kerja ZI sesuai prosedur pembentukan Tim ZI 3. Terbentuknya Tim Kerja ZI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pemilihan Tim Kerja ZI 2. SK, Tim Kerja Menuju Zona Integritas Pengadilan Agama Fakfak. 	Januari 2019
2	Dokumen Rencana Pembangunan ZI	Dokumen rencana kerja pembangunan ZI telah dibuat dan disosialisasikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan ZI, 2. Menentukan rencana aksi tahun 2019. 3. Mensosialisasikan kepada seluruh pegawai, sosialisasi melalui website 	Dokumen rencana kerja pembangunan ZI yang dipublikasikan di website Pengadilan Agama Fakfak	Januari s/d November 2019
3	Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM	Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM secara berkala per semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Evaluasi pembangunan WBK/WBBM setiap 6 bulan sekali, 2. Tindak lanjut hasil Monev Sebelumnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan rapat, daftar hadir, notulasi rapat. 2. Lembar Monev ZI, bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil Monev sebelumnya. 	
4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi / mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain.	Daftar hadir	

		Agen perubahan sudah ditetapkan	1. Menyusun SOP Pemilihan anggota Tim Agen Perubahan; 2. Menetapkan SK Tim Agen perubahan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SOP Pemilihan anggota Tim Agen Perubahan; ➤ SK Tim Agen Perubahan. 	
		Budaya kerja dan pola pikir untuk sudah dibangun di lingkungan organisasi	Pengarahan Ketua Pengadilan Agama Fakfak untuk membangun budaya kerja pelayanan prima dan mendorong partisipasi pegawai dalam pembangunan ZI melalui rapat, dan Pengarahan saat apel pagi dan sore	Daftar Hadir Rapat Tinjauan Dokumen; Notulen; Usulan; Perbaikan (Keputusan) Ketua, Laporan Kaji ulang Manajemen Pelayanan	Januari 2019
		Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM?	Daftar Hadir Rapat Tinjauan Dokumen; Notulen; Usulan; Perbaikan (Keputusan) Ketua, Laporan Kaji ulang manajemen Pelayanan	Daftar Hadir Rapat Tinjauan Dokumen; Notulen; Usulan; Perbaikan (Keputusan) Ketua, Laporan Monev manajemen Pelayanan	Januari 2019

II.	PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Utama.	<ul style="list-style-type: none"> SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai SOP telah dievaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh pegawai telah memiliki SOP yang telah ditetapkan, SOP tersedia di ruang pelayanan. Melaksanakan evaluasi dokumen SOP 	<ul style="list-style-type: none"> SOP Pengadilan Agama Fakfak, Laporan Hasil Evaluasi SOP 	Januari s/d Maret 2019
2	E- Office.	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> Absen menggunakan finger print. Manajemen Kepegawaian menggunakan SIMPEG, SIKEP dan KOMDANAS. Penggunaan WA grup untuk komunikasi internal Penggunaan Website dan e-mail Pengadilan Agama Fakfak. Penggunaan aplikasi SIPP, Penggunaan Aplikasi E-court Penggunaan Aplikasi SIWAS 	<ul style="list-style-type: none"> Finger print. Aplikasi SIMPEG Aplikasi SIKEP, APLIKASI KOMDANAS Grup Whats app internal; 	Januari 2019 s/d Desember 2019
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi;		<ul style="list-style-type: none"> Alamat website dan alamat e-mail Pengadilan Agama Fakfak. Aplikasi SIPP Aplikasi E-Court 	Januari 2019 s/d Desember 2019

			online Mahkamah Agung RI.	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi SIWAS online Mahkamah Agung RI. 	
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT pemberian layanan publik telah dilakukan monev secara berkala	Melakukan Monev pemanfaatan IT setiap enam bulan sekali dengan mengisi formulir MONEV	Formulir Monev pemanfaatan IT yang telah diisi	Juli & Desember 2019
3	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan	Pengadilan Agama Fakfak menerapkan keterbukaan informasi publik. menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu. Arsip dan dokumen secara rapi, jelas dan akurat	<ul style="list-style-type: none"> • Brosur dan Formulir Informasi & Pengaduan, • Dokumen Informasi dan Pengaduan, • Informasi Perkara. • Banner Prosedur Perkara. • Papan Pengumuman / Papan Informasi. 	Januari 2019
			Menampilkan Standar pelayanan publik dalam website,	<ul style="list-style-type: none"> • Menampilkan dokumen • SPP di website, • SK PPID, • Ruang PPID. • Form pengaduan, kotak pengaduan, sms centre, pengaduan via website 	Januari 2019
		Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dimonitoring dan dievaluasi secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi dokumen SPP, • Menyusun laporan PPID, • Menyusun laporan pengaduan 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi dokumen SPP setiap semester, • Laporan bulanan PPID dan pengaduan 	Januari-Desember 2019

III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM					
1	Perencanaan Kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	Menyusun analisa kebutuhan pegawai, Menyusun ANJAB ABK	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen ANJAB ABK, Laporan analisa Kenbutuhan pegawai 	Januari- Desember 2019
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Menyusun Analisa Kebutuhan Pegawai, Menyusun ANJAB ABK	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen ANJAB ABK, Laporan analisa Kenbutuhan pegawai 	Januari-Desember 2019
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan 2019 pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	Membuat Analisa SKP	Dokumen Analisa SKP	Januari 2019
2	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Unit kerja melakukan DDTK/Bimtek Untuk pengembangan kompetensi	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai melalui DDTK/Bimtek	<ul style="list-style-type: none"> Jadwal kegiatan DDTK/Bimtek Daftar hadir 	Januari-Desember 2019
3	Penetapan Kinerja	Terdapat penetapan kinerja	Membuat SKP	SKP tahun 2019	Januari 2019

	Individu	individu yang terkait dengan kinerja organisasi	tahunan		
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penilaian SKP	Hasil penilaian SKP.	Desember 2019
4	Penegakan aturan disiplin / kode etik pegawai	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodic	Memonitoring kinerja individu pegawai	Daftar penilaian prestasi pegawai	Desember 2019
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	Menyusun mekanisme Penilaian Pegawai Teladan ; Tim Penilai ; Kriteria yang jelas (SKP menjadi salah satu kriteria)	<ul style="list-style-type: none"> • SK penunjukan TIM penilai Role model. • SK.Penetapan pegawai teladan (Role mode) • Reward/Piagam 	Januari-Desember 2019
		Aturan disiplin / kode etik telah dilaksanakan /diimplementasikan	Membuat rekapitulasi pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik pegawai	Buku Rekapitulasi penjatuhan sanksi pelanggaran disiplin dan kode etik.	Januari-Desember 2019
5	Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian melalui SIMPEG/ SIKEP	File Pegawai	Januari-Desember 2019

IV		PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Ketua memberikan pengarahan dan menandatangani Lembar Pengesahan Usulan Proposal dan Rencana Kerja Kegiatan TA.2020	RKA- TA. 2020	Januari 2019
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Ketua terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan. Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LKJIP	Dokumen RENSTRA, Dokumen RKT, Dokumen IKU, Dokumen PKT, Dokumen LKJIP tepat waktu	Januari 2019
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	Laporan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	Semester I. 2019
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun T Renstra, RKT, Penetapan Kinerja	Renstra, RKT, Penetapan Kinerja Tahunan.	Januari 2019
		Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun Renstra RKT, Penetapan Kinerja	Renstra, RKT, Penetapan Kinerja Tahunan	Januari 2019
		Terdapat Indikator Kinerja (IKU)	Menyusun IKU di RENSTRA	Renstra, RKT, Penetapan Kinerja Tahunan	Januari 2019
		Indikator Kinerja telah SMART	Menyusun RENSTRA, RKT, RKA	Renstra, RKT, RKA	Februari 2019
		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LKJIP 2018	LKJIP 2018 tepat waktu	Februari 2019
		Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LKJIP 2018	LKJIP 2018 tepat waktu	Februari 2019
		Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Menyusun LKJIP 2018	LKJIP 2018	Adanya undangan Workshop penyusunan setiap tahunnya (2 kali)
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Menyusun SK Penyusun LKJIP dan Surat Tugas Pelatihan / workshop Penyusunan LKJIP	SK Penyusun LKJIP dan Surat Tugas Pelatihan / Workshop Penyusunan LKJIP	Januari 2019

V PENGUATAN PENGAWASAN					
1	Pengendalian Gratifikasi	Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan SK. Unit Pengendalian Gratifikasi. Menyusun SOP. Memasang poster tentang gratifikasi dilingkungan Pengadilan Agama Fakfak. Mensosialisasiikan Gratifikasi via website 	<ul style="list-style-type: none"> SK Unit Pengendalian Gratifikasi. SOP, laporan Unit Pengendalian Gratifikasi. Spanduk, Banner 	Januari-Desember 2019
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan. Pengendalian Internal telah dibangun di lingkungan Pengadilan Agama Fakfak 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat laporan Unit Pengendalian Gratifikasi setiap bulan dan pelaporan dipublish melalui website Pengadilan Agama Fakfak. Menyusun rencana atas hasil Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi. Menyusun dokumen Pengaduan, Menetapkan Petugas Pengaduan, Menggunakan WA Grup, sebagai media pengendalian Internal. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan UPG. Inovasi : Pelaporan Gratifikasi via Website. Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengendalian gratifikasi setiap semester. SK Petugas Pengaduan /SIWAS 	Januari s/d Desember 2019
		Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun petunjuk pelaksanaan pengendalian pelayanan Administrasi Pengadilan Agama Fakfak	Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Pelayanan Administrasi	Januari-Desember 2019
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Petugas Pengaduan melaksanakan kegiatan pengendalian di Lingkungan Pengadilan Agama Fakfak	Notulensi kegiatan pengendalian di Lingkungan Pengadilan Agama Fakfak.	Januari s/d Desember 2019
		Petugas Pengaduan telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Sosialisasi Petugas Pengaduan kepada seluruh pegawai	Sosialisasi terkait dengan Petugas Pengaduan. (Darftar hadir, notulen, laporan)	Januari s/d Desember 2019
3	Pengaduan masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Menyusun pedoman Penanganan pengaduan masyarakat yang telah dibuat. Koordinasi antar pejabat	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur pengaduan. SK Pengaduan Pengadilan 	Januari s/d Desember 2019

			terkait ,mekanisme, tata kerja dan prosedur penanganan pengaduan masyarakat	<p>Agama Fakfak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Register pengaduan. 	
		Hasil penanganan Pengaduan ditindaklanjuti	Menyusun Laporan Tindak Lanjut pengaduan setiap bulan sekali	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Laporan Pengaduan. • laporan pengaduan dipublish via website 	Januari s/d Desember 2019
		Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan pengaduan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat per semester	Laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Juni & Desember 2019
		Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan Masyarakat telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil monitoring dan evaluasi. • Tampilan laporan tersebut pada • Website Pengadilan Agama Fakfak. 	Juni, Desember 2019
4	Whistle Blowing System	Whistleblowing system diinternalisasikan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pedoman pelaksanaan Whistle blowing di lingkungan pengadilan agama fakfak. • Menetapkan pengelola WBS yang diperkuat dengan penetapan SK oleh pimpinan, • Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan whistle blowing system 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen/ Kebijakan WBS. • SK Pimpinan terkait pengelola WBS. • Undangan, daftar hadir, notulen • dan data dukung lainnya; • Publikasi via website PA Fakfak. 	Januari-Desember 2019
		Evaluasi atas penerapan whistle blowing system	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun program pengendalian pelaksanaan WBS, • menyusun program monev atas hasil • pengendalian pelaksanaan WBS 	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS	Januari-Desember 2019
		Hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system telah ditindaklanjuti	Menyusun program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS	Januari-Desember 2019
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Telah terdapat identifikasi / pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Fakfak mengacu pada Permenpan dan RB No. 37 tahun 2012. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman penanganan benturan kepentingan. • SK Tim penanganan benturan kepentingan. 	Januari-Desember 2019

			<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan tim penanganan benturan kepentingan. 		
		Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan / internalisasi	Sosialisasi pedoman penanganan benturan kepentingan di Pengadilan Agama Fakfak melalui rapat dinas	Daftar hadir, Notulen rapat.	Juli & Desember 2019
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Menyusun laporan implementasi penanganan benturan kepentingan (berupa matriks)	Laporan Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan (berbentuk matriks)	Juli & Desember 2019
		Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Melakukan Evaluasi penanganan benturan kepentingan	Laporan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Juli & Desember 2019
		Tindak lanjut laporan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Menindaklanjuti laporan evaluasi penanganan benturan kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • Berita acara Teguran. • Surat teguran. 	Januari-Desember 2019

VI		PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan Tim SPP; • Menyusun standar pelayanan publik; • Membuat SOP pelayanan difabel. • Mengimplementasikan ISO 9001:2015 	<ul style="list-style-type: none"> • SK Tim SPP • Panduan / Pedoman Standar pelayanan. • Inovasi : SOP Pelayanan untuk difabel. • Sertifikat SAPM 	Januari 2019
		Standar pelayanan telah di Maklumkan / dipublikasikan	Menyusun maklumat pelayanan, mensosialisasikan maklumat pelayanan via website	Maklumat standar pelayanan Inovasi ; Maklumat tercantum di website	Januari 2019
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia di ruang Pelayanan	SOP di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang	Januari 2019
		Dilakukan review terhadap standar pelayanan dan SOP.	Melaksanakan evaluasi dokumen SPP & SOP.	Dokumen laporan hasil evaluasi SPP, & SOP.	Desember 2019
2	Budaya Pelayanan Prima	Pelatihan dan Sosialisasi dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima.	Melaksanakan DDTK dan sosialisasi penerapan pelayanan prima.	Daftar hadir, notulen, dokumen terkait	Pebruari, April, Agustus, Desember 2019;
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Membuat poster, leaflet, dan Mempublikasikan melalui website	poster, leaflet dan website PA.Fakfak.	Januari s/d Desember 2019
		Terdapat sistem punishment (sanksi) / reward bagi pelaksana layanan;	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun prosedur pemberian sanksi / reward bagi pelaksana layanan. • Memberikan sanksi / reward bagi pelaksana layanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pelayanan • Piagam Penghargaan bagi pelaksana Layanan. • Teguran 	Januari s/d Desember 2019

		Telah terdapat sarana layanan terpadu / terintegrasi	Menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	<ul style="list-style-type: none"> • SK Penetapan TIM PTSP • Sarana dan prasarana PTSP. • SK PJ. Sarana dan Prasarana PTSP. 	Januari 2019
--	--	--	--	--	--------------

II KOMPONEN HASIL :					
NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	Penyelenggaraan Birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN	Persepsi terhadap Pelaksanaan Layanan yang bebas dari KKN	1. Melakukan Survey tentang Indeks persepsi korupsi di Pengadilan Agama Fakfak	Kuisisioner Survey IPK	Maret 2019
			2. Laporan Hasil Survey Persepsi Korupsi di Pengadilan Agama Fakfak	Dokumen Pelaporan hasil Survey IPK	Maret 2019
2	Kualitas Pelayanan Masyarakat.	Persepsi terhadap Kualitas Layanan di Pengadilan Agama Fakfak.	1. Melakukan Survey tentang kualitas Pelayanan di Pengadilan Agama Fakfak	Kuisisioner Survey SKM	Maret 2019
			2. Laporan Hasil Survey Persepsi Kualitas Pelayanan Pengadilan Agama Fakfak	Dokumen Pelaporan hasil Survey SKM	Maret 2019